



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 426 /B.IV/HK/1991

#### T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMPUNG TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG POLA ANGKUTAN  
UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMPUNG TENGAH

#### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah - Nomor. 188.342/592/04/1991, tanggal 11 Maret 1991 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung - Tengah Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pola Angkutan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan keamanan, kelancaran dan ketertiban Angkutan Penumpang dan Barang, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 ;  
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : MENGESENHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG POLA ANGKUTAN UMUM DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH, DE NGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pada konsideran " Mengingat " :
  - angka "3" diubah menjadi angka "1"
  - angka "1" diubah menjadi angka "2"
  - angka "2" diubah menjadi angka "3"
  - angka "8" dihapuskan.

2. BAB I .....

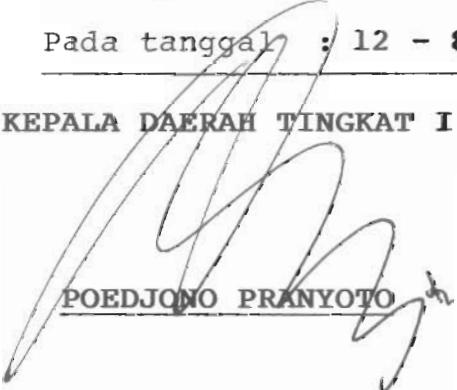
2. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1 huruf e diubah dan harus dibaca :
  - e. Kepala Dinas LLAJR : adalah Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Cabang Lampung Tengah;
3. Pasal 3 ayat (2), baris pertama antara kata-kata "dari" dan kata "ayat" ditambah dengan kata-kata "ketentuan". Dan Pasal 3 ayat (2) huruf c, baris pertama antara kata "berat" dan kata "yang" ditambah dengan kata "beban".
4. Pasal 14 ayat (3) baris pertama, antara kata "berat" dan kata "yang" ditambah dengan kata "beban".
5. BAB IX, PENYIDIKAN, Pasal 19 ayat (1) diubah dan harus dibaca:
  - (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan-dengan yang berlaku.
6. Pasal 19 ayat (2) baris pertama, penulisan kata "pelaksanaan - Penyidik" diubah menjadi "melaksanakan penyidikan".

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 12 - 8 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

  
POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri  
Cq. Sekretaris Jendral DDN  
di - Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Lampung Tengah  
di- Metro.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II  
Lampung Tengah  
di- Metro.
4. Himpunan Keputusan.